



## **HUBUNGAN KONSELING, SOSIAL EKONOMI DAN PERAN SUAMI TERHADAP PEMILIHAN KONTRASEPSI POST PARTUM DI PKJN RSJ DR.H. MARZOEKI MAHDI BOGOR TAHUN 2024**

**Fitri Andriyani**

Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi, Universitas Indonesia Maju

fiet0705@gmail.com

### **Abstrak**

Indonesia saat ini berada di urutan keempat Negara di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 270,20 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Meskipun laju penduduk di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan 0,24% dari 1,49% pada periode 2000-2010 menjadi 1,25% pada periode selanjutnya 2010-2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan konseling, sosial ekonomi dan peran suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024. Metode penelitian menggunakan metode *cross sectional*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu post partum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor sebanyak 125 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling* sebanyak 104 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna antara dukungan suami ( $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ ) dan konseling ( $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ ) dengan pemilihan kontrasepsi postpartum. Dan tidak ada hubungan social ekonomi dengan pemilihan kontrasepsi postpartum dengan nilai v-value 0,618. Simpulan peran suami merupakan variabel yang paling besar hubungannya dengan pemilihan kontrasepsi postpartum (OR = 11,364).

**Kata Kunci** : *Konseling, Sosial Ekonomi dan Peran Suami, KB*

### **Abstract**

Indonesia is currently in fourth place in the world with the largest population, namely 270.20 million people, based on the results of the 2020 population census. Although the population rate in Indonesia in the last decade has decreased by 0.24% from 1.49% in the 2000- 2010 to 1.25% in the next period 2010-2020. The aim of this research is to determine the relationship between counseling, socio-economics and the role of the husband on the choice of postnatal contraception at PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor in 2024. The research method uses a cross sectional method. The population used in this study were all post partum mothers at PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor as many as 125 people. The sampling method used was the Accidental Sampling method of 104 respondents. The results of the study showed that there was a significant relationship between husband's support ( $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ ) and counseling ( $p\text{-value} = 0.000 < 0.05$ ) with the choice of postnatal contraception. And there is no socio-economic relationship with postnatal pregnancy selection with a v-value of 0.618. In conclusion, the husband's role is the biggest variable in choosing postnatal contraception (OR = 11.364).

**Keywords**: *Counseling, Socioeconomic and Husband's Role, Family Planning*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2024

✉ Corresponding author : Fitri Andriyani

Address : Kp.Kadugedong, Kec. Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten 42252

Email : fiet0705@gmail.com

Phone : 0811 9488 607

## PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk diantaranya melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah suatu upaya dilakukan manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Melalui program KB akan terjadi pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga. Pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dalam pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi juga berkaitan dengan pemberian komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) kepada akseptor (Siregar, 2020).

Data WHO menunjukkan bahwa pengguna alat kontrasepsi Implant di seluruh dunia masih di bawah alat kontrasepsi suntik, pil, kondom dan IUD, terutama di Negaranegara berkembang. Presentasi penggunaan alat kontrasepsi suntik yaitu 35,3%, pil 30,5%, IUD 15,2%, sedangkan Implant dibawah 10% yaitu 7,3%, dan alat kontrasepsi lainnya sebesar 11,7%. Pada saat ini diperkirakan memakai IUD/AKDR, 30% terdapat di Cina, 13% di Eropa, 5% di Amerika Serikat, 6,7% di Negara-negara berkembang lainnya (Nurmalita Sari dkk., 2020). Data Kemenkes RI menyatakan pada tahun 2017 di Indonesia peserta KB aktif dengan penggunaan IUD sebesar 397.996 (7,75%), merupakan angka terendah dari jenis KB lainnya. Propinsi dengan persentase peserta KB aktif tertinggi adalah Bengkulu 85,5%, Bali 85,1%, dan DKI Jakarta 82%. Strategi peningkatan penggunaan IUD, terlihat kurang berhasil, terbukti dengan jumlah peserta KB IUD yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Salanti, 2020).

Indonesia saat ini berada di urutan keempat Negara di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 270,20 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Meskipun laju penduduk di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan 0,24% dari 1,49% pada periode 2000-2010 menjadi 1,25% pada periode selanjutnya 2010-2020. Namun pemerintah tetap mencanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan esensi tugas pokok menurunkan fertilitas agar dapat mengurangi beban pembangunan demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia sesuai dengan tugas dan tujuan program Keluarga Berencana (Arif and Nurwati, 2022).

Pemilihan alat kontrasepsi harus diputuskan dengan baik, dengan melihat kebutuhan, keuntungan dan efek samping dari pemakaian. Pemilihan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik akseptor seperti pendidikan, tingkat pengetahuan, pekerjaan, sikap jumlah anak (paritas), dan dukungan suami atau persetujuan pasangan. Dukungan yang diberikan oleh suami memantapkan pemakaian kontrasepsi pada istri dan bahkan istri merasa tenang menjadi peserta KB bila suaminya memberikan dukungan penuh, termasuk memenuhi saat konseling, pemasangan alat kontrasepsi, menemani control dan selalu mangayomi istri saat sesuatu yang tidak di inginkan terjadi. Masyarakat berasumsi bahwa tanggung jawab pemilihan serta penggunaan alat kontrasepsi diserahkan semata-mata pada wanita. Peneliti melihat terdapat kesenjangan yang perlu dicermati dimana proses pemilihan alat kontrasepsi haruslah menjadi keputusan bersama antara suami maupun istri (Nani *et al.*, 2020).

Data dari BKKBN peserta KB aktif di Indonesia menurut metode kontrasepsi modern tahun 2018 dapat diketahui pemakaian IUD sebesar 7,35%, MOW (tubektomi) sebesar 2,76%, MOP (vasektomi) sebesar 0,5%, implan sebesar 7,2%, suntik sebesar 63,71%, kondom 1,24%, dan pil sebesar 17,24%. Kepesertaan KB aktif pada bulan Maret 2020 terdapat penurunan jika dibandingkan pada bulan february 2020 di seluruh Indonesia. KB IUD pada february 2020 dari 36.155 turun menjadi 23.383. Sedangkan implan dari 81.062 menjadi 51.536, suntik dari 524.989 menjadi 341.109, pil 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP (vasektomi) dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW (tubektomi) dari 13.571 menjadi 8.093 (Wijayanti, Nindyastuti and Najib, 2021).

Dalam memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, diantaranya tersedianya alat bantu visual yang menyediakan referensi atau info teknis jenis kontrasepsi yang harus digunakan oleh konselor KB. Lembar balik alat bantu pengambilan keputusan ber-KB (ABPK) merupakan alat bantu konseling KB yang berisi informasi mutakhir seputar kontrasepsi serta standar proses dan langkah konseling KB yang berlandaskan pada hak klien KB dan inform choice. ABPK juga berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan metode KB yang akan digunakan klien serta dapat membantu pemecahan

masalah dalam penggunaan alat kontrasepsi KB. Konseling yang berkualitas antara konselor (tenaga kesehatan) dan klien sangat menentukan bagi keberhasilan program keluarga berencana (KB) (Hutabarat, Nyorong and Asriwati, 2022).

Data yang diperoleh pada tahun 2020 ibu yang langsung menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan 12,5%, tahun 2021 14,2%, tahun 2022 17,3% dan dari bulan Januari-Oktober 2023 ibu yang melahirkan postpartum spontan 26 orang, ibu yang melahirkan SC 103, ibu yang melakukan curet 17 orang. Sedangkan ibu yang memilih menggunakan alat kontrasepsi MOW 21 orang dan yang menggunakan IUD setelah Postpartum 3 orang. Berdasarkan data tersebut dari 146 ibu postpartum hanya 16,4% ibu yang langsung menggunakan alat kontrasepsi.

Survey awal yang dilakukan peneliti di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) masih mengalami kesulitan didalam menentukan pemilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena keterbatasan metode yang tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk status kesehatan, efek samping potensial, konsekuensi kegagalan atau kehamilan yang tidak diinginkan, besar keluarga yang direncanakan, persetujuan pasangan bahkan norma budaya lingkungan dan orang tua. Untuk itu semua, konseling merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana. Berdasarkan uraian dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Hubungan konseling, sosial ekonomi dan peran suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024”.

## METODE

Metode yang digunakan adalah metode *cross sectional*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu post partum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor sebanyak 125 orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling* sebanyak 104 responden. menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan uji *chi square* dengan bantuan computer program SPSS

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pemilihan Kontrasepsi Postpartum

Pemilihan kontrasepsi postpartum	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Tidak Melakukan Kontrasepsi	57	54.8
Melakukan Kontrasepsi	47	45.2
Total	104	100

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 104 responden ibu yang tidak langsung memilih alat kontrasepsi postpartum sebanyak 57 orang (54,8%). Sedangkan ibu yang langsung memilih alat kontrasepsi postpartum sebanyak 47 orang (45,2%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Konseling, Sosial Ekonomi Dan Peran Suami

Variabel	Katagori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Peran Suami	Tidak Mendukung	53	51.0
	Mendukung	51	49.0
Konseling	Tidak Efektif	49	47.1
	Efektif	55	52.9
Status Ekonomi	Kurang	57	54.8
	Baik	47	45.2

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 104 orang responden ibu postpartum yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 53 orang (51%) dan ibu postpartum yang mendapatkan dukungan dari suaminya menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 51 orang (47,9%). Ibu postpartum yang mendapatkan konseling kurang efektif sebanyak 49 orang (47,1%) dan yang mendapatkan konseling dengan efektif sebanyak 55 orang (52,9%). Ibu postpartum yang memiliki ekonomi kurang dari UMR sebanyak 57 orang (54,8%) dan yang memiliki ekonomi baik lebih dari UMR sebanyak 47 orang (45,2%).

Tabel 3. Hubungan Konseling Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Postpartum

Konseling	Pemilihan Kontrasepsi				Jumlah	P-value	OR
	Tidak Melakukan Kontrasepsi		Melakukan Kontrasepsi				
	f	%	f	%			
Tidak Efektif	39	79,6	10	20,4	49	100	
Efektif	18	32,7	37	67,3	55	100	0,000 8,017
Total	57	54,8	47	45,2	104	100	

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 104 responden ibu yang mendapatkan konseling tidak efektif tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 39 orang (79,6%) dan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 10 orang (20,4%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$   $(0,000) < \alpha$   $(0,05)$ , maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara konseling terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024. Dari hasil analisis diperoleh  $OR=8,017$  dengan taraf kepercayaan 95%, maka ibu yang mendapatkan konseling kurang efektif memiliki resiko 8 kali lebih besar tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan konseling dengan efektif.

Tabel 4. Hubungan Sosial Ekonomi Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Postpartum

Sosial Ekonomi	Pemilihan Kontrasepsi				Jumlah		P-value
	Tidak Melakukan Kontrasepsi		Melakukan Kontrasepsi				
	f	%	f	%	f	%	
Kurang	33	57,9	24	42,1	57	100	0,618
Baik	24	51,1	23	48,9	47	100	
Total	57	54,8	47	45,2	104	100	

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 104 responden ibu yang memiliki social ekonomi kurang dari UMR tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 33 orang (57,9%) dan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 24 orang (42,1%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$   $(0,618) > \alpha$   $(0,05)$ , maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara social ekonomi terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024.

Tabel 5. Hubungan Peran Suami Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Postpartum

Peran Suami	Pemilihan Kontrasepsi				Jumlah		P-value	OR
	Tidak Melakukan Kontrasepsi		Melakukan Kontrasepsi					
	f	%	f	%	f	%		
Tidak Mendukung	43	81,1	10	18,9	53	100	0,000	11,364
Mendukung	14	27,5	37	72,5	51	100		
Total	57	54,8	47	45,2	104	100		

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa dari 104 responden ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 43 orang (81,1%) dan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 10 orang (18,9%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$   $(0,000) < \alpha$   $(0,05)$ , maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara Peran Suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024. Dari hasil analisis diperoleh  $OR=11,364$  dengan taraf kepercayaan 95%, maka ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya memiliki resiko 11 kali lebih besar tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan dukungan dari suaminya.

### Pembahasan

#### Hubungan konseling terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian ibu yang mendapatkan konseling tidak efektif tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 39 orang (79,6%) dan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 10 orang (20,4%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$   $(0,000) < \alpha$   $(0,05)$ , maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara konseling terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2024. Dari hasil analisis diperoleh  $OR=8,017$  dengan taraf kepercayaan 95%, maka ibu yang mendapatkan konseling kurang efektif memiliki resiko 8 kali lebih besar tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan konseling dengan efektif.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan suatu proses penyampaian pesan pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain. Selain itu untuk memengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa (Ifroh, dkk, 2019).

Stagnansi dari peningkatan pelayanan KB disebabkan belum optimalnya konseling sebagai sarana Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) pelayanan keluarga berencana. Konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan Keluarga Berencana. Dengan melakukan konseling, maka petugas

membantu klien dalam memilih kontrasepsi yang akan digunakan. Penyampaian informasi yang jelas dan benar mengenai metode KB dapat membantu klien mengenal kebutuhannya, untuk memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Konseling yang baik akan membantu klien menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Metode konseling kesehatan tidak lepas dari peran bidan dalam memberikan konseling. Bidan sebagai provider memiliki tugas pelayanan untuk memberikan informasi yang baik dan benar kepada calon akseptor. Provider memiliki peran penting untuk membantu perempuan dalam mendampingi pemilihan alat kontrasepsi (Hernawati et al., 2022).

Metode yang digunakan oleh bidan untuk melakukan konseling salah satunya dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK). Metode konseling dengan ABPK menggunakan satu alat, yaitu lembar balik ABPK yang berisi semua informasi alat kontrasepsi. Namun, metode tersebut terlalu banyak memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak membantu menemukan pilihan terbaik akan alat kontrasepsi yang akan dipilih (BKKBN, 2018). Dari metode di atas Kemenkes dan BKKBN mulai tahun 2018 bekerjasama untuk melakukan percobaan konseling dengan menggunakan metode Strategi Konseling Berimbang (SKB) atau Balanced Counseling Strategy (BCS) di beberapa kota di Indonesia. Strategi Konseling Berimbang (SKB) mulai digunakan pada Agustus 2016 sampai dengan sekarang difasilitasi pelayanan kesehatan (BKKBN, 2018). SKB memiliki kelebihan dimana pemberian konseling berfokus pada klien. Strategi Konseling Berimbang (SKB) merupakan konseling keluarga berencana yang praktis, interaktif, ramah untuk klien dan mendorong partisipasi aktif klien. Pada konseling menggunakan SKB ini, keputusan benar-benar berdasarkan keinginan klien tanpa dipengaruhi keinginan yang datang dari konselor, hak klien dan hak konselor setara, hal inilah yang dimaksud dengan seimbang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Friska (2018) dimana hasil penelitiannya berdasarkan pengaruh terhadap pengetahuan konseling KB pada masa kehamilan didapatkan bahwa mayoritas pengetahuan responden terhadap KB cukup setelah dilakukannya konseling tentang KB. Setelah dianalisa secara statistik maka

diperoleh nilai  $P < 0,000$  yang artinya ada pengaruh dilakukannya konseling tentang KB pasca persalinan dengan pengetahuan responden tentang KB pasca persalinan.

Pelayanan KB pasca persalinan merupakan strategi yang penting dari kesehatan masyarakat dengan keuntungan yang signifikan terhadap ibu dan bayinya. Idealnya pemilihan kontrasepsi pasca persalinan, telah diperkenalkan pada saat kehamilan agar tidak terlambat untuk mendapatkannya karena pada umumnya wanita mulai menggunakan kontrasepsi pada minggu keenam pasca persalinan. Pelayanan KB pasca persalinan merupakan salah satu program strategi untuk menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Seorang wanita yang baru melahirkan bayi biasanya lebih mudah untuk diajari menggunakan kontrasepsi, sehingga waktu setelah melahirkan adalah waktu yang paling tepat untuk mengajak seorang ibu menggunakan kontrasepsi. Tujuan pelayanan KB pasca persalinan adalah untuk mengatur jarak kehamilan/kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Pelayanan KB pasca persalinan dimulai dengan pemberian informasi dan konseling yang sudah dimulai sejak masa kehamilan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan memegang peranan penting dalam memberikan informasi dan konseling KB pasca persalinan kepada calon peserta KB.

Dalam kelas ibu hamil, salah satu materi yang dibahas adalah tentang KB pasca persalinan dan dalam empat kali pertemuan, minimal satu kali pertemuan, ibu hamil didampingi oleh suami atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan ibu selama hamil, bersalin, nifas, termasuk kesehatan bayi yang baru dilahirkannya dan kebutuhan akan KB pasca persalinan menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh keluarga. Dalam P4K, ibu hamil dan keluarga diberi penjelasan tentang kesehatan maternal termasuk KB pasca persalinan dan diminta untuk menandatangani amanat persalinan yang salah satunya adalah kesepakatan tentang metode KB yang akan dipakainya kelak setelah persalinan. Namun dalam kenyataannya, pelayanan KB pasca persalinan ini belum terlaksana dengan baik, terbukti dengan cakupan pelayanan yang masih sangat rendah. Beberapa hal yang mengakibatkan ibu hamil tidak langsung menggunakan kontrasepsi yaitu, ingin menyusui secara eksklusif, memberikan ASI Eksklusif adalah sangat baik untuk bayi selain sebagai nutrisi utama untuk

bayi, memperpanjang masa menyusui juga sebagai metode kontrasepsi yang dapat digunakan ibu

### **Hubungan sosial ekonomi terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024**

Berdasarkan hasil penelitian ibu yang memiliki social ekonomi kurang dari UMR tidak menggunakan alat kontasepsi sebanyak 33 orang (57,9%) dan yang menggunakan alat kontasepsi sebanyak 24 orang (42,1%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$  (0,618)  $>$   $\alpha$  (0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara social ekonomi terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian jaksa (2023) antara status ekonomi dengan pemilihan kontrasepsi, didapatkan bahwa terdapat hubungan antara status ekonomi dan pemilihan kontrasepsi dengan  $p\text{ value} = 0,000$  dan  $OR = 0,328$  (95%  $CI = 0,297 - 0,362$ ).

Hal ini berarti, responden dengan status ekonomi rendah cenderung memilih kontrasepsi non hormonal. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa di dalam pemilihan alat kontrasepsi sebaiknya memang harus dilihat dari kapasitas kemampuan mereka untuk membeli kontrasepsi tersebut (Bakri,2020). Untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang diperlukan harus menyediakan dana yang diperlukan, pernyataan ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa status ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pemilihan suatu alat kontrasepsi. Selain itu juga dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh lingkup sosial, ekonomi dan politi (Apriani, 2021). Dalam memenuhi kebutuhan pokok atau primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah menyisihkan biaya untuk penggunaan atau pemakaian alat kontrasepsi dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah (Komsari, 2021) karena mereka lebih memikirkan hasil yang memuaskan. Sedangkan yang berpendapatan rendah lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak dan beranggapan bahwa metode kontrasepsi lebih

Asumsi peneliti bahwa dalam memenuhi kebutuhan pokok atau primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah menyisihkan biaya untuk penggunaan atau pemakaian alat kontrasepsi hormonal

dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah karena mereka lebih memikirkan hasil yang memuaskan. Sedangkan yang berpendapatan rendah lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak dan beranggapan bahwa metode kontrasepsi hormonal lebih murah apabila dibandingkan dengan metode kontrasepsi mekanik. Selain pengaruh faktor ekonomi, faktor sosial budaya pun disinyalir mempengaruhi perilaku PUS dalam pemilihan dan pemakaian alat kontrasepsi. Pendidikan, pengetahuan, keyakinan dan tradisi, serta religiusitas masyarakat merupakan faktor-faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi perilaku pemilihan metode kontrasepsi.

### **Hubungan peran suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024**

Berdasarkan hasil penelitian ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya tidak menggunakan alat kontasepsi sebanyak 43 orang (81,1%) dan yang menggunakan alat kontasepsi sebanyak 10 orang (18,9%). Dari uji statistik diperoleh  $p\text{-value}$  (0,000)  $<$   $\alpha$  (0,05), maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara Peran Suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024. Dari hasil analisis diperoleh  $OR=11,364$  dengan taraf kepercayaan 95%, maka ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya memiliki resiko 11 kali lebih besar tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan dukungan dari suaminya.

Besarnya peran suami akan sangat membantunya dan suami akan semakin menyadari, bahwa masalah kesehatan reproduksi bukan hanya urusan wanita (istri) saja. Peran lain suami adalah memfasilitasi (sebagai orang yang menyediakan fasilitas), memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan masalah kesehatan reproduksinya. Hal ini dapat terlihat saat suami menyediakan waktu untuk mendampingi istri memasang alat kontasepsi atau kontrol, suami bersedia memberikan biaya khusus untuk memasang alat kontrasepsi dalam hal ini lebih banyak suami mendukung untuk menggunakan kontrasepsi hormonal, dan membantu istri menentukan tempat pelayanan atau tenaga kesehatan yang sesuai (Padila, 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan KB baik KB pascalin maupun setelah pascalin diantaranya pendidikan, usia, paritas, peran suami, peran

tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi terkait keluarga berencana baik metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek (Fatiah, 2023; Lubis, Rizki and Priyanti, 2023). Penggunaan kontrasepsi identik dengan jarak kelahiran, alasan yang paling sering dikutip untuk jarak kelahiran adalah ekonomi dimana PUS membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari nafkah, mengurangi kemiskinan, dan untuk meningkatkan kondisi hidup (Husnah, Maulani and Purwanti, 2023).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani Sri, Hadiningsih EF, Masyita Gita dan Purwanti Heni (2023) Dari 57 responden diperoleh 16 responden (28,1%) dengan dukungan suami baik, 36 responden (63,2%) yang dukungan suami cukup dan 5 responden (8,8%) dengan dukungan suami kurang terhadap minat dalam penggunaan kontrasepsi IUD. Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$  sehingga menyatakan ada hubungan dukungan suami terhadap minat penggunaan kontrasepsi IUD Nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$  sehingga menyatakan ada hubungan pengetahuan terhadap minat penggunaan kontrasepsi IUD.

Peneilitan ini juga sejalan dengan penelitian Nurcahyanti (2019), suami adalah seorang yang pertama dan utama dalam memberi dorongan kepada istri sebelum pihak lain memberikan dorongan dan perhatian seorang suami terhadap istri yang akan memilih KB. Dalam melaksanakan Keluarga Berencana, dukungan suami sangat diperlukan. Seperti diketahui, bahwa di Indonesia keputusan suami dalam mengizinkan istri adalah pedoman penting bagi istri untuk menggunakan alat kontrasepsi. Bila suami tidak mengizinkan atau mendukung, hanya sedikit istri yang berani untuk tetap memasang alat kontrasepsi tersebut. Dukungan suami sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan menggunakan atau dipengaruhi oleh faktor sosial budaya.. Penelitian yang lain menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami yang dirasakn ibu dengan perilaku penggunaan alat kontrasepsi (Huda, et al., 2016).

Hasil penelitian ini peneliti berasumsi, bahwa adanya hubungan yang bermakna dikarenakan suami dipandang sebagai kepala rumah tangga dan segala sesuatu harus di komunikasikan dengan baik antara suami dan istri, juga dikarenakan adanya pengetahuan yang cukup bagi suami, sehingga memotivasi istri untuk penggunaan alat kotrasepsi tentunya jenis

pemilihan juga tidak lepas dari peran suami karena jenis kontrasepsi memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa responden ibu postpartum yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 53 orang (51%) Ibu postpartum yang mendapatkan konseling kurang efektif sebanyak 49 orang (47,1%). Ibu postpartum yang memiliki ekonomi kurang dari UMR sebanyak 57 orang (54,8%).

Ada hubungan yang bermakna antara konseling terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024 dengan nilai  $v$ -value  $0,000 < \alpha$  (0,05) dan nilai  $OR=8,017$ .

Tidak Ada hubungan yang bermakna antara social ekonomi terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024 dengan nilai  $v$ -value  $0,618 > \alpha$  (0,05)

Ada hubungan yang bermakna antara Peran Suami terhadap pemilihan kontrasepsi postpartum di PKJN RSJ dr.H. Marzoeeki Mahdi Bogor tahun 2024 dengan nilai  $p$ -value  $0,000 < \alpha$  (0,05) dan nilai  $OR=11,364$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani AARI, Karmini NL. Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Probabilitas Penggunaan Alat Kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu. E-Jurnal Ekon Pembang Univ Udayana. 2021;10(6):2283–312.
- Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, IV*, 55–70
- Bakri B, Limonu HS. Penggunaan Alat KB pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). *J Kependud Indones*. 2020;15(1):71–84.
- Fatiah, M. S. (2023) 'Gambaran Karakteristik Pengguna Metode Kontrasepsi', *Ners Pahlawan*, 7, pp. 274–279.
- Friska Megowoti Sitorus, Julio Mohdoleno Siohoon. 2018. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dalam Upaya Mendukung Percepatan Penurunan Angka

- Kematian Ibu.  
<https://doi.org/10.31764/mj.v3i2.505>
- Husnah, R., Maulani, R. G. and Purwanti, P. (2023) 'Pengaruh Pengetahuan terhadap Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Wilayah Kerja Puskesmas Botania Tahun 2023', *Jurnal Ners*, 7(2), pp. 1009–1013. doi: 10.31004/jn.v7i2.16549.
- Hutabarat, D. S., Nyorong, M., & Asriwati, A. (2022). Efektivitas Komunikasi Informasi Dan Edukasi Dengan Metode Ceramah Dan Media Leaflet Terhadap Pengambilan Keputusan Pasangan Usia Subur ( Pus ) Dalam Memilih Alat Kontrasepsi Dipuskesma Namotrasi Kabupaten Langkat. *MIRACLE Journal*, 2(1), 116–127. <https://doi.org/10.51771/mj.v2i1.244>
- Komsari, Asep S, Hartiningsih T. Hubungan Antara Pendapatan Keluarga dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan. *J Ilmu-Ilmu Kesehat Bakhti Husada Kuningan*. 2012;1(1):1–5.
- Lubis, S., Rizki, M. and Priyanti, E. (2023) 'Faktor -faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi Iud di Puskesmas Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi', *Jurnal Ners*, 7(2), pp. 1398–1406. doi: 10.31004/jn.v7i2.16939.
- Nani, S., Makassar, H., Pemilihan, A., Rismawati, B. P. M., Maros, K., Rismawati, B. P. M., Maros, K., Rismawati, B. P. M., Maros, K., Kunci, K., Peran, P., Berencana, K., Berencana, K., & Berncana, K. (2020). *Peran suami dalam pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi di bpm rismawati kabupaten maros*. 5, 29–33.
- Nurchayanti, I. (2019). Hubungan dukungan suami dalam pemilihan kontrasepsi jangka panjang pada ibu akseptor KB berusia lebih dari 35 tahun di Desa Sidomukti Kecamatan Badungan Kabupaten Semarang. Skripsi Stikes Ngudi Waluyo.]
- Nuraeni, N., & Rahmadyanti, R. (2023). Pemilihan Kontrasepsi Pasca Salin (KBPP) di RSUD Karawang. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 15(2), 1–9.
- Padila. (2019). Keperawatan maternitas sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jakarta: Medical Book.
- Rotinsulu, F. G. F., Wagey, F. W., & Tendean, H. M. M. (2021). Gambaran Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Wanita di Indonesia. *E-CliniC*, 9(1), 243–249. <https://doi.org/10.35790/ecl.v9i1.32478>
- Siregar, Z. M. (2020). *Pengaruh Pemberian Konseling dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Ibu Pasca Bersalin di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020*.
- Sinaga, Elvipson. (2020). Faktor (Umur, Pendidikan, Pengetahuan Dan Paritas, Dukungan Suami, Budaya, Ketersediaan Alat Kontrasepsi, Dan Ketersediaan Tenaga Terlatih) Yang Berhubungan Dengan Pemakaian Kontrasepsi AKDR/IUD Diwilayah Kerja Puskesmas Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. <http://www.slideshare.net/ElvipsonSinaga/elvipson-tesis>, diunduh tanggal 02 Maret 2024.
- Suryani Sri, Hadiningsih EF, Masyita Gita dan Purwanti Heni. 2023. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dan Dukungan Suami Terhadap Minat Penggunaan Kontrasepsi IUD di Wilayah Puskesmas Kampung Bugis Kelurahan Gayam. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*. Vol 2 No 4 Februari 2023. E-ISSN : 2809-1612, P-ISSN : 2809-1620.
- Widya Emamarida Ocvita, M. N. (2023). *Keterlibatan pasangan dengan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Krian, Kabupaten Sidoarjo*. 13, 13–22.
- Wijayanti, U. T., Nindyastuti, N. A. I., & Najib. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelayanan KB. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634.